

KOMITMEN PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM LIPUTAN MEDIA

Ihsanira Dhevina Enggarratri
Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Sekretariat Negara
Email: dhevinaira@yahoo.com

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga yang sejak didirikan telah mendapat simpati sangat besar serta menjadi tumpuan harapan khalayak. Pemberantasan korupsi memerlukan komitmen kuat dari KPK serta semua pihak terutama penyelenggara negara. Tanpa adanya komitmen, pemberantasan korupsi menjadi sia-sia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana komitmen KPK dan komitmen penyelenggara negara terhadap gerakan anti korupsi. Tema ini dipilih karena bagi masyarakat Indonesia, hampir setiap hari pemberitaan mengenai kasus korupsi mewarnai liputan di media. Penelitian ini menggunakan unit analisis teks pada judul liputan selama 4 bulan di tahun 2017, 2018 dan 2019 yang kemudian dianalisis melalui analisis framing. Selanjutnya, dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan adanya perbedaan komitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi antara KPK dengan penyelenggara negara. Manfaat dari penelitian ini memperlihatkan peran media dalam menyajikan fakta terkait komitmen penyelenggara negara dalam fenomena upaya pemberantasan korupsi.

Kata kunci : KPK, korupsi, komitmen, penyelenggara negara

Abstract

The Corruption Eradication Commission or Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) is an institution, since established, has gained numerous sympathy and has become the public's hope. Efforts to eradicate corruption requires strong commitment from the KPK itself and all parties, especially public officials. With the absence of commitment, corruption eradication would be nothing. This research is conducted to determine how far KPK and its official to fight corruption. The topic is chosen because of how common it is the news of corruption among Indonesian.

The unit of analysis was text title of news coverage for 4 months during 2017, 2018, and 2019, that are analyzed through framing analytics. Furthermore, using a qualitative approach, this research discovered the existence of different commitment for efforts eradicating corruption within KPK and public officials. This research will benefit by exposing the role of media in showing facts related with the commitment of public officials in efforts to eradicate corruption.

Keywords : KPK, corruption, commitment, state organizer

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan persoalan korupsi yang dapat dikatakan cukup serius, sebagaimana dinyatakan oleh Transparency International, lembaga internasional yang bergerak pada upaya pencegahan korupsi . Secara rutin, lembaga ini melakukan survey untuk mengukur tingkat persepsi publik terhadap korupsi di suatu negara sehingga menghasilkan *Corruption Perception Index (CPI)* yang menempatkan Indonesia pada kriteria negara dengan kriteria kasus korupsi yang mudah ditemui dan kerap terjadi. Sebagai gambaran, dari skore tertinggi 100 (kriteria bersih korupsi), Indonesia berada di posisi 38 (1998) dan 37 (1997). Disisi lain, perangkat hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi dapat dikatakan mencukupi serta diperkuat dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Pemikiran inilah sebagai dasar penelitian ini dilakukan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa perkembangan korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus maupun jumlah kerugian keuangan negara dan dilakukan dengan cara yang makin sistematis.. Korupsi sudah termasuk dalam kategori *extra ordinary crime* yaitu kejahatan luar biasa yang memerlukan upaya penanggulangan yang luar biasa pula. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur tugas dan wewenang KPK. Keberadaan KPK dan keseriusannya dalam melaksanakan tugas cukup mendapat apresiasi publik. Publik menaruh harapan kepada KPK selaku lembaga resmi yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menekan angka di Indonesia. Di mata publik, KPK juga merupakan wujud dari komitmen

pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi, guna mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi demi publik makmur dan sejahtera.

Transparency International menyatakan korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai hadiah, pemberian dan hal-hal yang sifatnya memiliki maksud tertentu atau politis, tergantung pada jumlah kerugian yang ditimbulkan dan pada sektor mana terjadinya. Korupsi juga dapat dimaknai sebagai penyalahgunaan sumber daya milik publik untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (*the abuse of public resources or public power for personal gain*). Pengertian korupsi cukup beragam.

Blackburn, Bose dan Haque (2004) menyatakan korupsi di sektor publik sebagai suatu pelanggaran hukum, keuntungan bagi aparat negara yang menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Definisi lain dari Shleifer dan Vishny (1993) bahwa korupsi sebagai penjualan (aset) negara, oleh aparat pemerintah untuk keuntungan pribadi. Pengertian yang menggambarkan salah satu bentuk korupsi oleh penyelenggara negara. Pada konteks pemerintahan suatu negara, korupsi berarti kemerosotan sistemik terhadap praktik dan komitmen pembentuk sistem pemerintahan yang sehat (Buchanan, 2004). Ditengah maraknya kasus korupsi, kehadiran KPK tidak hanya diterima dengan sangat baik tetapi juga dipandang sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap komitmen pemberantasan korupsi.

Bagi khalayak Indonesia, liputan media massa mengenai korupsi merupakan hal yang mengundang perhatian. Dalam memberitakan tindak korupsi, media massa saat ini semakin tampak memiliki keberanian akan keterbukaan jika dibandingkan dengan era sebelumnya. Kramer (2013) menyatakan bahwa pada iklim politik saat ini, media di Indonesia dapat mengetengahkan beragam isu politis yang sebelumnya termasuk tabu. Sebelumnya, kasus korupsi hampir merupakan pemberitaan yang jarang disajikan kepada khalayak, sedangkan saat ini tidak sulit menemukan liputan mengenai tindak korupsi baik tingkat daerah hingga nasional. Bahkan di beberapa media menempatkan liputan kasus korupsi sebagai headline yang mencolok hingga menjadikannya sebagai isu di tingkat nasional. Selanjutnya Kramer (2013) juga menyebutkan keterbukaan media di Indonesi dalam mengetengahkan suatu liputan korupsi hampir merupakan sebuah obsesi setelah bertahun adanya sensor dalam pemberitaan korupsi (*“The desire to report openly on corruption case becomes almost an obsession in Indonesia following decades of media censorship on the issue”*).

Bagi khalayak di era informasi sekarang, media massa menjadi andalan untuk memperoleh informasi. Menurut Ashadi Siregar (2004:27), terdapat empat hal utama dalam penyajian liputan yang menarik, yaitu:

1. Kepentingan (*Significance*), yaitu peristiwa yang mampu mempengaruhi atau berdampak terhadap kehidupan masyarakat luas.
2. Besar (*Magnitude*), yaitu peristiwa terkait jumlah atau angka-angka yang berarti bagi kehidupan masyarakat.
3. Waktu (*Timeliness*), yaitu kejadian yang menyangkut hal-hal yang baru terjadi.
4. Kedekatan (*Proximity*), yaitu kejadian yang memiliki kedekatan bagi pembaca, secara geografis maupun emosional.

Liputan terkait KPK dan kasus korupsi dapat dikatakan memenuhi keempat kriteria pemuatan menarik. Jika liputan media terhadap kasus korupsi dianalisis dengan keempat kriteria dimaksud maka, liputan korupsi memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat (*significance*); angka-angka berupa besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi, menimbulkan daya tarik (*magnitude*) tersendiri. Dari sisi *timeliness*, liputan media terkait korupsi selalu mengedepankan kebaruan dalam liputan, termasuk dalam mengikuti perkembangan dari suatu kasus. Selain itu, liputan mengenai korupsi dapat dikatakan memiliki kedekatan secara emosional (*proximity*) dengan khalayak sebagai pihak yang dirugikan. Korupsi telah diketahui masyarakat sebagai bentuk tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat sendiri. Hal ini tentu memberikan pengaruh emosional bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian mengenai sejauhmana komitmen anti korupsi dimiliki oleh penyelenggara negara yang didasarkan dari liputan media diharapkan dapat menyajikan suatu wawasan baru yang mampu menjelaskan tingginya tingkat korupsi di Indonesia walaupun di sisi lain, negara telah memiliki perangkat hukum yang memadai bagi upaya anti korupsi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif kajian teks pada judul dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi pada judul di rubrik nasional pada Kompas.com pada (<https://nasional.kompas.com>) edisi bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus tahun 2017, 2018 dan 2019. Periode penelitian ditetapkan saat ramainya pemberitaan pasca pengumuman kasus dugaan korupsi KTP elektronik dan terjadinya peristiwa penyiraman air keras

terhadap penyidik senior KPK pada April 2017. Pemilihan Kompas sebagai unit observasi karena saat ini, Kompas.com merupakan media daring dari versi cetak yang telah mencapai 470.000 eksemplar dan Kompas versi daring yang dapat diakses netizen dalam dan luar negeri. (korporasi.kompas.id). Sebagai media pemberitaan terkemuka, Kompas.com tentu menghindari liputan yang bersifat sensasi dan berupaya untuk seimbang dan obyektif guna menjaga posisinya sebagai media terpercaya. Selain itu, di era informasi ini, pemilihan pada media daring karena penjiannya yang kerap *terupdate* disepanjang hari sebagaimana “media alarm” (Jankowski & van Selm: 2000; Spark:2000 dalam Klaus Schönbach, Ester de Waal and Edmund Lauf:2005); serta merupakan kategori media baru – digitalisasi bentuk surat kabar konvensional karena meluasnya pemakaian internet.

McCombs, Shaw & Weaver (1997) menyatakan bahwa *framing* sebagai tingkat berikutnya dari agenda setting (*framing as second-level agenda setting*). Artinya, jika teori agenda setting melihat sisi liputan maka, pendekatan *framing* akan dilakukan untuk menjelaskan pemaknaan dari setiap liputan sehingga akan diperoleh gambaran lebih jelas mengenai situasi dan kondisi yang dihadapi KPK. Framing juga sebagai pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang dianggap penting dan ditonjolkan kepada khalayak (Eriyanto, 2005).

Analisis teks pada judul– dengan menggunakan metode framing dari Robert M. Entman (1993), “*Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, casual interpretation, moral evaluation, and/ or treatment recommendation for the item described*”. Pembingkaiian memiliki makna memilih beberapa sisi dari realitas/ fakta dan mengemasnya dalam teks pesan (komunikasi), menjadikannya sebagai suatu permasalahan, penafsiran, evaluasi dan/atau langkah rekomendasi. Intinya, analisis ini menggambarkan ada aspek tertentu dari fakta yang disampaikan oleh media.

Beberapa literatur menyebutnya bahwa analisis *framing* memberikan gambaran kekuatan dari suatu teks dalam penyampaian informasi dan memperlihatkan pengaruhnya terhadap kesadaran manusia (*human consciousness*). Dengan demikian, informasi yang tertulis pada judul memiliki daya pengaruh kepada diri khalayak – pengaruh yang mampu memunculkan kesan positif, netral atau negatif – yang berarti mendukung, netral atau menghambat.

Pada penelitian ini, *framing* dilakukan pada judul dan mengelompokkannya pada kategori positif, netral atau negatif. Kategori positif artinya setelah membaca judul liputan/berita, pembaca akan cenderung memiliki pandangan positif terhadap komitmen lembaga lain dalam mendukung anti korupsi. Sebaliknya, judul yang bernuansa negatif berarti minim komitmen atau menghambat upaya anti korupsi. Sedangkan kategori netral tentu tidak menyebabkan timbulnya kesan apapun baik mendukung atau menghambat upaya anti korupsi.

Fokus pengelompokkan akan didasarkan pada struktur retorik yang merupakan salah satu bagian dari struktur analisis *framing* dari Zhongdang Pan dan Geraald Konsicki. Struktur pada teks judul menggambarkan pemilihan atau pemakaian kata untuk menekankan fakta. Dengan demikian, pilihan kata yang dipakai pada judul liputan menunjukkan bagaimana Kompas.com memaknai suatu fakta dan menyampaikannya kepada khalayak pembaca. Hal ini juga terkait dengan kekuatan media melalui gaya penyajiannya yang mampu mempengaruhi kesadaran khalayak dalam membentuk pandangan terhadap suatu topik liputan dan realita yang ada – *that discourse has made power eternalized as it conveys knowledge into people's consciousness and then gives an effect to their's perspective in seeing the reality* (Wodak, 2009)

Penelitian ini merujuk pada teori Agenda Setting untuk melihat peran media sebagai saluran informasi seperti dinyatakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972) bahwa media berperan dalam menentukan hal-hal yang perlu diketahui oleh khalayak pembaca. Media tidak menentukan *what to think* namun memberi pengaruh pada *what to think about* (“*The press is significantly more than a surveyor of information and opinion. It may not be successful much of the time in telling the people what to think, but it is stunningly successful in telling readers what to think about*”). Inilah kemampuan media dalam membentuk pengetahuan khalayak tentang apa yang dianggap penting.

Agenda setting bergerak dalam tiga elemen yaitu agenda media, agenda khalayak dan agenda kebijakan. Agenda media terdiri dari dimensi tingkat liputan (*visibility*), tingkat kebutuhan khalayak (*audience salience*) dan tingkat kesenangan yang ditimbulkan oleh suatu liputan (*valence*). Agenda khalayak meliputi dimensi tingkat kesadaran khalayak terhadap suatu topik liputan (*familiarity*), tingkat keterkaitan dengan kepentingan pribadi (*personal salience*), dan tingkat senang tidaknya terhadap topik berita (*favorability*). Adapun agenda kebijakan terdiri dari dimensi dukungan terhadap topik liputan (*support*), kemungkinan tindakan yang akan diambil

oleh pemerintah (*likelihood of action*), kebebasan mengambil tindakan (*freedom of action*) (Severin dan Tankard, 1992 dalam Nurudin, 2007:198).

Liputan media terkait dengan upaya pemberantasan korupsi dan KPK sebagai lembaga strategis yang memiliki peran penting, merupakan liputan yang hampir selalu menarik perhatian publik.. Informasi yang disajikan oleh media (agenda media) menjadi bagian dari perhatian atau pemikiran publik (agenda publik). Teori ini menunjukkan adanya hubungan saling mempengaruhi antara media dan publik; keduanya memiliki peran yang perlu diperhatikan dan terdapat hubungan saling ketergantungan antara keduanya dalam menentukan liputan. Pada tahap selanjutnya, kedua agenda akan memberi pengaruh pada agenda kebijakan.

Jika liputan mengenai KPK dalam upaya pemberantasan korupsi diletakkan dalam dimensi-dimensi teori agenda setting, maka dari sisi agenda media, yaitu dimensi *visibility* terkait korupsi di edisi daring termuat hampir setiap hari dengan jumlah lebih dari satu artikel. Pada suatu *hot topic* yang menjadi *headlines* kerap disajikan dalam beragam sudut pandang. Pada dimensi *audience salience*, tampak jelas khalayak memerlukan liputan terkait korupsi karena setiap pemberitaan mengenai korupsi adalah mengenai terjadinya tindakan yang merugikan publik. Pada dimensi *valence*, publik sebagai pihak yang dirugikan tentu dalam diri akan merasakan efek dari liputan tersebut sebagai hal yang tidak menyenangkan walaupun di satu sisi merasakan adanya kebutuhan untuk mengetahui hal tersebut. Di sinilah terjadi kontradiktif, pembaca dihadapkan pada dua pilihan untuk memilih membaca demi memenuhi kebutuhannya akan informasi atau menghindarinya. Namun, jika melihat dari tingkat liputan yang cukup sering dan adanya saling mempengaruhi antara media dan publik maka dapat dikatakan liputan mengenai korupsi merupakan liputan yang bernilai strategis.

Agenda khalayak meliputi dimensi *familiarity*, khalayak Indonesia menyadari bahwa kasus korupsi merupakan hal yang perlu diberantas dan KPK telah dianggap sebagai lembaga penting yang patut memperoleh dukungan dari segenap elemen bangsa. Segala topik terkait KPK dan perannya telah cukup lekat di benak khalayak dan bukan hal yang asing. Adapun pada dimensi *personal salience*, walaupun tidak terkait secara langsung dengan kepentingan pribadi pembaca, namun tindak korupsi tampaknya telah dirasakan publik sebagai hal yang mengambil hak hidup sejahtera publik. Pada dimensi *favorability*, secara umum dapat dikatakan bahwa topik terkait korupsi, ibarat dua mata uang di satu sisi mengusik keprihatinan dan sisi lain memberikan rasa lega jika topik mengarah pada upaya positif bagi pencegahan dan pemberantasan.

Adapun dalam agenda kebijakan, dimensi *support*, terlihat dari frekuensi liputan pada Kompas.com setiap harinya. Artinya, adanya saling memerlukan informasi; dan eksistensi mediaupun bergantung pada khalayak sehingga ada upaya dari media untuk menjaga “kesamaan” antara topik (agenda) media dan topik (agenda) publik. Dimensi *likelihood of action*, meliputi dinamika yang ditimbulkan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan topik yang diliput. Terakhir adalah dimensi *freedom of action*, yaitu adanya kebebasan bagi pemerintah dalam mengambil tindakan terkait pemberantasan korupsi.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Menurut teori Agenda Setting, media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi apa yang dipikirkan khalayak tentang suatu topik liputan. Liputan terkait korupsi dengan sentimen tertentu dan melibatkan penyelenggara negara, akan membentuk pemahaman khalayak akan komitmen penyelenggara negara terhadap gerakan anti korupsi. Pada liputan Mei 2017, Kompas.com memuat 12 artikel. Analisis teks pada judul liputan di Kompas.com menghasilkan 6 judul dalam kategori positif, 1 netral dan 5 negatif. Judul-judul dengan kategori positif diantaranya: *Ramai-ramai "Balik Badan" Tolak Hak Angket KPK; Jokowi: KPK Tidak Pernah Takut; KPK Klaim Sudah Lakukan Fungsi Pencegahan secara Optimal*. Sedangkan, *Kepada Jokowi, KPK Usul Agar Pemecatan PNS Dipermudah* termasuk dalam kategori netral. Adapun teks judul yang dikategorikan negatif yaitu *KPK Masih Hitung Uang Sitaan dalam OTT Pejabat BPK dan DPR Versus KPK*. Kompas.com menunjukkan jumlah yang hampir seimbang antara liputan yang bermakna dukungan dan hambatan bagi KPK.

Juni 2017, Kompas.com memuat 5 artikel. Analisis teks pada judul liputan di Kompas.com tidak menghasilkan judul dalam kategori positif, 1 netral dan 4 negatif. Judul netral yaitu *Pemerintah dan DPR Putuskan RUU KUHP Atur Pidana Korupsi* dan judul dalam kategori negatif yaitu, diantaranya *Suap Gubernur Bengkulu Terkait Dua Proyek Pembangunan Jalan; Anggota DPR Kembali Ditangkap KPK, Bupati Magetan Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Sepatu PNS*.

Juli 2017, Kompas.com memuat 18 artikel. Analisis teks pada 18 judul menghasilkan 6 liputan dalam kategori positif, 3 netral dan 9 negatif. Judul-judul dengan kategori positif diantaranya, yaitu *Jokowi Akan Terbitkan Perpres Strategi Nasional Antikorupsi; Jokowi Akan*

Turun Tangan jika Pansus Berupaya Bubarkan KPK; Kasus Suap Opini WTP, Dua Pejabat Kemendes Segera Disidang. Teks pada judul mengesankan adanya dukungan bagi upaya pemberantasan korupsi dari presiden berupa penerbitan Perpres dan tindakan langsung untuk melindungi KPK. Dukungan juga tampak dari salah satu lembaga kementerian yang mendukung proses hukum bagi pejabatnya yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.

Teks yang termasuk dalam kategori netral adalah *Jokowi: Saya Tidak Komentar Dulu Ya, untuk Masalah Pak Setya Novanto; Istana Jelaskan Dua Alasan Jokowi Tak Intervensi Pansus Angket KPK; Senin, Tito Menghadap Jokowi Jelaskan Perkembangan Kasus Novel.* Judul menampilkan sisi kenetralan pihak kepolisian dan presiden dalam menyikapi perkembangan yang terjadi terkait pemberantasan korupsi. Selanjutnya, teks yang termasuk dalam kategori negatif, diantaranya yaitu *Ketua KPK Nilai Ucapan Fahri Hamzah seperti Melecehkan Pengadilan; Ketika Akun Instagram DPR Unggah "KPK Kerjanya 'Nguping'...; Presiden Dinilai Lamban dalam Merespons Teror terhadap Novel Baswedan.* Teks dalam kelompok negatif menggunakan kata-kata dengan makna jelas seperti *melecehkan*, *'nguping'* dan *lamban*; kesemuanya bermakna negatif dan memberi kesan kepada pembaca sebagai bentuk hambatan bagi eksistensi dan peran KPK.

Bulan Agustus 2017, terdapat 12 artikel seluruhnya termasuk kategori negatif, seperti *Suap Rp 5,1 Miliar kepada Wali Kota Tegal Ongkos Politik untuk Maju Jadi Petahana Ini; Ini Kekayaan Sekda Jabar yang Ditahan KPK dalam Kasus Suap Meikarta dan Jokowi Kritik Kinerja Penegak Hukum: Berapa Uang Negara yang Diselamatkan KPK, Polri, dan Kejaksaan?.*

Tabel 1.
Jumlah Liputan dan Kategori tahun 2017

KOMPAS.COM (2017)			
BULAN	DUKUNGAN (+)	NETRAL (.)	HAMBATAN (-)
MEI	6	1	5
JUNI	0	1	4
JULI	6	3	9
AGUSTUS	0	0	12

JUMLAH	12	6	30
--------	----	---	----

Mei 2018, Kompas.com memuat 15 artikel. Analisis semantik pada judul artikel menghasilkan 1 liputan dalam kategori positif, 1 netral dan 13 negatif. Judul-judul dengan kategori positif yaitu *Survei: Kepuasan Terhadap Kinerja KPK dan Polri Meningkat, DPR Terendah*. Sedangkan kategori netral adalah *Perpres Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Direvisi Lebih Sederhana*. Kategori dengan makna negatif, diantaranya adalah *Kasus DPRD Kota Malang, KPK Dalam Dugaan Gratifikasi 18 Tersangka; KPK Periksa 5 Pejabat Kabupaten Bandung Barat; Perpres Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Direvisi Lebih Sederhana*.

Juni 2018, Kompas.com memuat 10 artikel. Analisis judul artikel menghasilkan 1 judul artikel bermakna positif, 3 netral dan 6 negatif. Judul dengan kategori positif, yaitu *Sepanjang 2018, KPK Terima 798 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 7,2 Miliar*. Sedangkan kategori netral, yaitu *KPK Awasi Potensi Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi Jelang Lebaran* dan yang termasuk dalam kategori negatif, antara lain, *KPK: Bupati Purbalingga Minta Uang Rp 500 Juta untuk Loloskan Lelang; Periksa Bupati Bengkalis, KPK Konfirmasi Dugaan Aliran Dana dari Perusahaan-perusahaan; 3 Tersangka Kasus Suap Wali Kota Kendari Segera Disidang*.

Pada liputan bulan Juli 2018, terdapat 18 artikel. Analisis judul artikel menghasilkan 1 judul artikel bermakna positif, 17 judul dalam makna negatif. Judul dengan kategori positif, yaitu *KPK Apresiasi Pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi* sedangkan yang bermakna tidak atau kurang memiliki komitmen terhadap gerakan anti korupsi, diantaranya *ICW sebut Korupsi Dana Otsus Daerah Berpotensi Menguat; KPK: OTT Kepala Daerah adalah Tragedi* dan *KPK: Semestinya Pejabat Publik Memberikan Contoh Kepatuhan Hukum*.

Agustus 2018, seluruhnya terdapat 6 judul artikel dengan kategori negatif, seperti *Daftar Panjang Korupsi Dunia Peradilan dan Fenomena Hakim Tipikor; Kasus Suap Proyek, KPK Panggil Kepala Dinas PU Kota Blitar dan Terima Suap, Hakim Tipikor Medan Gunakan Sandi "Ratu Kecantikan"*.

Tabel 2.

Jumlah dan Kategori Liputan tahun 2018

KOMPAS.COM (2018)			
BULAN	DUKUNGAN (+)	NETRAL (.)	HAMBATAN (-)
MEI	1	1	13
JUNI	1	3	6
JULI	1	0	17
AGUSTUS	0	0	6
JUMLAH	3	4	42

Mei 2019, Kompas.com memuat 16 artikel. Analisis semantik pada judul artikel menghasilkan 1 liputan dalam kategori positif, dan 15 negatif. Judul dengan kategori positif adalah *9 Kepala Daerah di Sumut Teken Komitmen Pencegahan Korupsi*. Adapun judul bermakna minimnya komitmen terhadap gerakan anti korupsi, diantaranya *KPK Tetapkan Wali Kota Dumai Sebagai Tersangka; Sejak 2012, Ada 20 Hakim Tersangkut Kasus Korupsi* dan *KPK Kembali Koordinasi dengan Polisi Militer AL Terkait Kasus Bakamla*. Juni 2019, Kompas.com memuat 8 artikel, seluruhnya dalam kategori negatif, dengan judul antara lain *Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK; KPK Telusuri Sumber Dugaan Penerimaan Gratifikasi Rp 50 Miliar Mantan Bupati Cirebon; dan KPK Kembali Tetapkan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai Tersangka*.

Juli 2019, Kompas.com memuat 20 artikel. Analisis teks pada judul liputan di Kompas.com menghasilkan 2 judul dalam kategori positif, 1 netral dan 17 negatif. Judul-judul positif yaitu *KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi di Sulawesi Selatan* dan *Kejaksaan Agung Diminta Hukum Berat Anggotanya yang Korupsi*. Sedangkan termasuk bernada netral adalah *KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN 9 Perwira yang Diusulkan Polri Jadi Capim KPK*. Sedangkan termasuk dalam kategori negatif, antara lain *Tiga Menteri Jadi Saksi Kasus di KPK, Layakkah Dipertahankan Jokowi?; Daftar Gubernur yang Dijerat KPK sejak 2017 dan TGPF Sebut Kasus Penyerangan Novel Baswedan Diduga Berlatar Belakang Politik*.

Pada liputan bulan agustus 2019, terdapat 9 judul artikel yang bermakna negatif, diantaranya *Kasus Suap Impor Bawang Putih, KPK Segel Ruangan di Kemendag dan Kementan; KPK Geledah Rumah Dinas Wali Kota Dumai* dan *Bos Dealer Jaguar Suap Pegawai Pajak Rp 1,8 Miliar. 5 Orang Jadi Tersangka*.

Tabel 3.
 Jumlah dan Kategori Liputan tahun 2019

KOMPAS.COM (2019)			
BULAN	DUKUNGAN (+)	NETRAL (.)	HAMBATAN (-)
MEI	1	0	15
JUNI	0	0	8
JULI	2	1	17
AGUSTUS	0	0	9
JUMLAH	3	1	49

Tabel 4 memperlihatkan perbandingan dalam persentase terhadap liputan artikel mengenai kasus korupsi, dari tahun ke tahun selama masa penelitian. Adanya peningkatan jumlah judul liputan yang bermakna negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi atau dengan kata lain, tampak berbanding terbalik dengan komitmen anti korupsi. Sebagaimana tertera pada tabel 4, cerminan makin rendahnya komitmen anti korupsi diantara penyelenggara negara secara berturut-turut, mewarnai 63,8% dari seluruh liputan (2017), selanjutnya 85,7% liputan (2018) dan 92,4% (2019).

Tabel 4.
 Perbandingan Jumlah dan Kategori Liputan tahun 2017, 2018 dan 2019

KOMPAS.COM			
TAHUN	DUKUNGAN (+)	NETRAL (.)	HAMBATAN (-)
2017	12	5	30 (63,8%)

2018	3	4	42 (85,7%)
2019	3	1	49 (92,4%)
JUMLAH	18	10	121

Pembingkaiian adalah memilih beberapa aspek pada suatu realitas dan menjadikannya tampak jelas dalam suatu teks komunikasi, guna menonjolkan suatu permasalahan, penafsiran umum, evaluasi moral dan/ atau usulan penyelesaian masalah” (Weaver, 2007). Sesuai dengan tujuan penelitian ini, analisis data melalui *framing* menghasilkan gambaran sejauh mana komitmen atau dukungan penyelenggara negara – termasuk lembaga pemerintah, legislatif dan yudikatif terhadap peran KPK sebagai lembaga anti korupsi. Hasil penelitian menunjukkan adanya dominasi liputan yang menunjukkan adanya hambatan atau kurangnya komitmen terhadap gerakan anti korupsi oleh penyelenggara negara. Liputan yang terkait sikap penyelenggara negara yang minim komitmen merupakan bentuk ketidakberpihakan terhadap anti korupsi.

Sisi agenda media telah mengungkap realita terkait kepentingan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi utama media yaitu fungsi *surveillance of the environment* (Wright, 1959). Fungsi ini dimaknai sebagai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh media terhadap lingkungannya; baik terkait masalah ideologi, politik, ekonomi, soial maupun budaya. Hubungan antara (agenda) media dan (agenda) khalayak dapat diartikan sebagai hubungan saling mempengaruhi dan memiliki kepentingan bersama terhadap informasi, bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa keberadaan media tidak lepas dan tergantung dari kepentingan khalayak.

Karen Siune dan Ole Borre (1975) menyebutkan adanya tiga faktor pengaruh dalam agenda setting yaitu: representasi, persistensi dan persuasi. Jika ketiga faktor pengaruh dalam *agenda setting* digunakan sebagai kacamata pada hasil *framing* karakteristik liputan maka, diperoleh gambaran sebagai berikut:

Representasi, yaitu apa yang dianggap penting oleh media dipengaruhi oleh kepentingan khalayak. Dalam hal ini, Kompas.com akan berperan memenuhi kepentingan publik terhadap topik pemberantasan korupsi. Hasil penelitian yang memperlihatkan dominasi kategori negatif pada judul liputan, berarti khalayak perlu memahami bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan

korupsi masih dihadapkan pada sejumlah hambatan dan belum memperoleh cukup dukungan khususnya dari penyelenggara negara. Faktor pengaruh yang kedua, Persistensi yaitu mempertahankan kesamaan agenda antara apa yang menjadi isu media dan apa yang menjadi isu publik. Terjaganya keselarasan antara agenda media dan agenda publik dalam penyajian informasi merupakan strategi eksistensi media. Sebagai media *mainstream*, Kompas.com tampak memahami keingintahuan khalayak terhadap persoalan korupsi di Indonesia, sehingga penyajian liputan dikemas dengan pilihan kata yang bermakna kuat untuk menarik perhatian sekaligus menggugah nurani khalayak pembaca guna mengawal gerakan anti korupsi dan peran KPK. Faktor pengaruh ketiga, Persuasi, yaitu saat agenda media mempengaruhi agenda publik. Dominasi liputan dengan kategori tertentu akan membentuk dan mempengaruhi kesan atau pandangan publik terhadap suatu isu. Liputan dengan proporsi dominan dalam kategori negatif misalnya, secara umum dapat dianggap sebagai pandangan publik mengenai fenomena terkait upaya pemberantasan korupsi yang minim komitmen dari penyelenggara negara, sebagaimana pada teks judul menyebutkan antara lain walikota, bupati, hakim, kepala dinas, beberapa kementerian serta DPR. Padahal, dalam tata penyelenggaraan negara yang baik atau *good governance* pelaku penyelenggaraan negara memiliki andil sangat penting. Komitmen penyelenggara negara merupakan dasar bagi setiap arah kebijakan anti korupsi.

Indonesia termasuk negara yang memenuhi kriteria sebagai negara yang berkomitmen terhadap anti korupsi. Secara resmi, lembaga perwakilan rakyat dan elemen pemerintah telah mendukung peran KPK melalui seperangkat aturan hukum (Indrayana, 2008). Hal ini juga diperkuat oleh Kantor Staf Presiden yang menyatakan terpenuhinya komitmen anti korupsi di Indonesia selain diwujudkan oleh seperangkat aturan juga adanya implementasi terintegrasi dari *whistle-blowing system (WBS)* dengan KPK dan LPSK (antikorupsi.org, 2018).

Namun, adanya dominasi liputan negatif menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sikap resmi atau komitmen dengan kenyataan. Contohnya, liputan yang dimuat di Kompas.com tanggal 20 Juli berjudul ***Ketika Akun Instagram DPR Unggah "KPK Kerjanya 'Nguping'...*** merupakan kutipan dari judul artikel pada akun resmi DPR. Judul tersebut menuai ribuan komentar masyarakat net (*netizen*) terkait pemuatan dua foto oleh akun DPR. Netizen menilai sebagai unggahan tidak etis dan tidak mencerminkan kewibawaan sebuah akun resmi lembaga negara. Sikap dan perilaku penyelenggara negara dan tampilan akun resmi lembaga negara dapat mencerminkan adanya sikap dan komitmen yang berbeda antara penyelenggara negara dengan

KPK dalam gerakan anti korupsi. Kata-kata pada judul dapat dimaknai sebagai bentuk kritikan terhadap KPK dan ketidaksetujuan DPR terhadap langkah KPK.

Hal ini diperkuat dengan hasil survei Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Polling Center bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang mendapat tingkat kepercayaan publik paling rendah terkait agenda pemberantasan korupsi dan sebanyak 86% responden mengandalkan Presiden dan KPK sebagai pihak yang dipercaya (<http://nasional.kompas.com>). Padahal, pemberantasan korupsi hanya dapat diwujudkan saat seluruh elemen publik dan lembaga penyelenggara negara memiliki komitmen yang sama kuat.

Gerakan anti korupsi saat ini cukup gencar dilakukan oleh KPK dan secara umum masyarakat memahami korupsi sebagai persoalan yang harus ditiadakan karena menimbulkan kerugian luar biasa bagi bangsa dan negara. Namun, apa yang tampak dari hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan dari koordinator ICW bahwa sektor hukum dan politik merupakan dua persoalan yang menghambat upaya pemberantasan korupsi, dan KPK sering terlihat bekerja “sendiri” (antikorupsi.org, 2018). Bekerja “sendiri”nya KPK dan adanya hasil penelitian dengan dominasi kategori negatif yang berarti dari sejumlah liputan mengenai korupsi, liputan yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggara negara merupakan liputan yang mendominasi; dapat disebutkan sebagai faktor-faktor yang layak dipertimbangkan sebagai jawaban atas tujuan dari penelitian ini.

Kesimpulan

Korupsi telah lama menjadi persoalan di Indonesia dan menyita perhatian publik. Berdirinya KPK sebagai tumpuan harapan bagi upaya pemberantasan korupsi. Meskipun menjadi salah satu sumber informasi yang dipercaya publik. Namun, pada liputan media kerap dijumpai adanya perbedaan komitmen antar KPK dengan lembaga penyelenggara negara dalam pemberantasan korupsi. Dalam kerangka teori Agenda Setting, liputan Kompas.com telah memperlihatkan keselarasan antara agenda media dan agenda publik. Liputan yang disajikan tidak hanya terkait upaya pemberantasan korupsi oleh KPK namun juga memperlihatkan sejauh mana komitmen KPK dan penyelenggara negara terhadap gerakan anti korupsi. Liputan dalam Kompas.com menunjukkan dominasi liputan dalam kategori negatif; artinya gerakan anti korupsi masih dihadapkan pada berbagai hambatan atau dengan kata lain, belum memperoleh dukungan berupa komitmen yang sama kuat dari penyelenggara negara.

Pemberantasan korupsi hanya dapat diwujudkan saat seluruh elemen bangsa memiliki komitmen yang kuat. Idealnya, peran masyarakat dalam mendorong gerakan anti korupsi dapat terwakili oleh lembaga legislatif seperti DPR. Namun hasil penelitian memperlihatkan, terdapat komitmen yang tidak sama antara lembaga legislatif dengan KPK. Di masa mendatang, diperlukan penelitian yang lebih mendalam guna mengetahui sejauh mana perkembangan selanjutnya dari komitmen penyelenggara negara dan untuk mengetahui apakah suatu komitmen memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga legislatif, dan seluruh pelaksana penyelenggaraan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Eriyanto. 2005. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Indrayana, Denny. 2008. *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- McCombs, M., Shaw, D. L., & Weaver, D. 1997. *Communication and Democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda-setting Theory*. Mahwah, USA: Erlbaum.
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Siregar, Ashadi. 2004. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media Massa*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Wright, Charles R. 1959. Mass Communication: A Sociological Perspective, dalam Baran, Stanley. J and Davis, Dennis, K. *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*. 2009. Boston: Wadsworth Cengage Learning.

Journal articles

- Blackburn, K., Bose, N., & Haque, M. 2004. Endogenous Corruption in Economic Development dalam Melgar, Natalia, Ma´ximo Rossi dan Tom W. Smith. 2010. The Perception Of Corruption. *International Journal of Public Opinion Research*, (Volume 22, 1), 120 - 131,
<https://doi.org/10.1093/ijpor/edp058>, akses 5 Juni 2019
- Buchanan, Bruce. 2004. The Moral Physics of the Body Politic: Changing Contours of Corruption in Western Political Thought, *Proceedings of the Australasian Political Studies Association Conference*. University of Adelaide (September - October 2004) dari, akses 11 Oktober 2019, dari <http://www.adelaide.edu.au/apsa/papers/>
- Entman, Robert M. Entman. 1993. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43 (4 December), 51–58.

- Martini, M. 2012, August 7. *Causes of Corruption in Indonesia*. U4: Anti Corruption Resource Centre, akses 25 September 2019, dari <http://www.u4.no/publications/causes-of-corruption-in-indonesia>
- McCombs, Maxwell., Donald Shaw.1972. The Agenda Setting Function of Mass Media. *The Public Opinion Quarterly*, 36(2), Summer, 176 – 187, akses 11 Juli 2018, dari <http://links.jstor.org/sici?sici=0033-362X%281972.22%2936%3A2%3C176%3ATAFOMM%3E2.0.CO%3B2-5>
- Schönbach, Klaus, Ester de Waal and Edmund Lauf. 2005. Online and Print Newspapers: Their Impact on the Extent of the Perceived Public Agenda. *European Journal of Communication*, (20), 245-258
- Shleifer, A., & Vishny, R. 1993. Corruption. *Quarterly Journal of Economics*, (108), 599–617
- Siune, Karen dan Ole Borre. 1975. Setting the Agenda for a Danish Election, *Journal of Communication*, (25), 65-73, akses 5 Mei 2018, dari <http://www.onlinelibrary.wiley.com>
- Weaver, David H. (2007). Thoughts on Agenda Setting, Framing, and Priming. *Journal of Communication*, 57 (1), 142–147
- Wodak, R. 2009. *The Discourse of Politics in Action: Politics as Usual* dalam Nur Latifah Umi Satiti. Representation of Muslim Women in the Western Media. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 14(2). Desember 2017. 189 – 202

Online articles

<http://korporasi.kompas.id>, akses 28 Desember 2017

<http://nasional.Kompas.com>. *Survei: 86 Persen Responden Andalkan Jokowi dan KPK Berantas Korupsi*, akses 20 Juli 2017

<http://nasional.Kompas.com>. *Ketika Akun Instagram DPR Unggah "KPK Kerjanya 'Nguping'..."*, akses 20 Juli 2017

<https://www.transparency.org/what-is-corruption?>, akses 3 Desember 2017